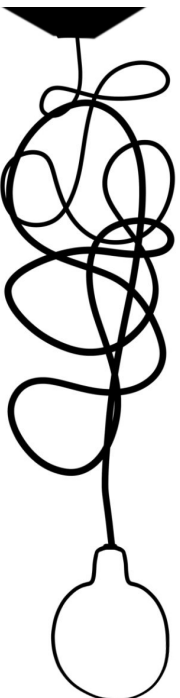
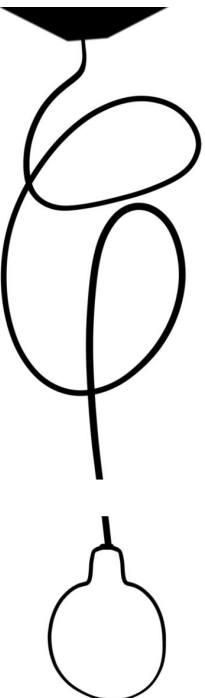
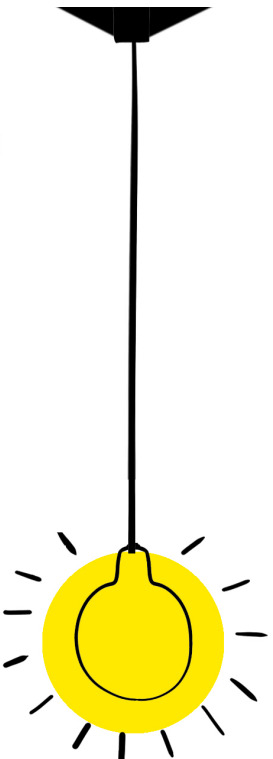


# BAGIAN SATU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Dilema ini merupakan cerminan dari sifat perekonomian Riau yang secara fundamental kurang terstruktur dengan baik. Sektor-sektor basis di Riau berkembang tak terkendali. Perkebunan sawit marak dimana-mana tetapi tidak didukung oleh kesiapan kelembagaan pada tingkat petani yang memadai.



## DILEMA EKONOMI RIAU 2014-2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Pertumbuhan ekonomi Riau memasuki akhir tahun 2013 tekeleda lesu. Perlambatan yang signifikan mulai terasa sejak triwulan kedua. Bank Indonesia Pekanbaru merilis pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan ketiga kian terbanting yang hanya tumbuh sebesar 4 persen. Diperkirakan sampai akhir tahun kondisinya masih sulit untuk pulih sehingga pada tahun 2014 akan menjadi tantangan tersendiri untuk bisa menemukan resep yang mujarab sehingga perekonomian Riau kembali bergairah.

Sektor-sektor yang selama ini memberikan kontribusi besar menampakkan performance yang tidak menggembirakan. Dari sisi penggunaan ekspor terkoreksi cukup tajam, padahal kontribusinya dalam struktur perekonomian Riau tinggi, yakni berkisar 40 persen. Pada triwulan kedua ekspor non migas Riau mampu tumbuh mencapai 1,13 persen dan pada triwulan ketiga turun menjadi 0,04 persen. Selama ini struktur ekspor Riau terkonsentrasi pada produk CPO dan Bubur Kertas. Penurunan permintaan dunia terhadap kedua komoditas tersebut akan sangat berdampak pada ekspor.

Sementara itu, investasi juga melemah, terutama yang bersumber dari Penanaman Modal Asing. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai cermin investasi pada triwulan kedua masih tumbuh sebesar 9,88 persen maka pada triwulan ketiga turun menjadi 5,75 persen. Meskipun berbagai proyek dalam negeri (PMDN) mengalami



sedikit peningkatan namun proyek-proyek modal asing menurun sangat tajam. Pada triwulan kedua PMDN terdiri dari 34 proyek dan triwulan ketiga meningkat menjadi 39 proyek. Sedangkan PMA dari 54 proyek turun menjadi hanya 10 proyek.

Pada sisi penawaran perekonomian Riau mengalami penurunan hampir di semua sektor. Sektor tradable tanpa migas pada triwulan kedua tumbuh sebesar 5,81 persen turun menjadi 5,34 persen pada triwulan ketiga. Pada kelompok ini hanya sektor industri pengolahan yang menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan. Sedangkan sektor pertambangan dan sektor pertanian terkoreksi cukup tajam. Sektor pertanian sebagai sektor andalan dan mendominasi struktur perekonomian Riau pada triwulan kedua tumbuh sebesar 5,49 persen dan pada triwulan ketiga turun menjadi 4,16 persen. Melambatnya geliat perekonomian di sektor pertanian searah dengan kian jenuhnya investasi dalam sub-sektor perkebunan. Pada sisi lain pengembangan sub-sektor pertanian tanaman pangan kurang tergarap secara baik.

Pada sektor non-tradable yang mengalami kontraksi paling tajam adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada triwulan kedua sektor ini mampu tumbuh 9,36 persen. Sementara pada triwulan ketiga justru mengalami pertumbuhan negatif sebesar - 0,41 persen. Gambaran ini seakan memberi sinyal mulai jenuhnya bisnis perhotelan dan restoran di Riau padahal disatu sisi jumlah hotel kian bertambah. Tingkat persaingan dalam bisnis perhotelan dan restoran kian tajam dan pada akhirnya dapat menimbulkan adanya hotel-hotel yang mengalami kerugian.

Sektor keuangan dan jasa perusahaan terkoreksi pula sangat signifikan dari 10,40 persen turun menjadi 5,31 persen. Sedangkan sektor pengangkutan dan komunikasi dari 9,78 persen pertumbuhannya turun menjadi 3,99 persen. Hal yang sama juga terjadi pada sektor-sektor lainnya dan secara keseluruhan sektor non-tradable terkoreksi sangat tajam dari 8,33 persen di triwulan kedua 2013 menjadi 2,66 persen pada triwulan ketiga.





tekanan lain terhadap perekonomian Riau yang berkait erat dengan kesejahteraan rakyat adalah inflasi. Laju inflasi di Kota Pekanbaru pada triwulan ketiga mencapai 8,33 persen dan di Kota Dumai sudah mendekati angka psikologis yakni 9,01 persen. Tingkat inflasi ini jauh melonjak jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2012 yakni di Kota Pekanbaru hanya 3,35 persen dan di Kota Dumai sebesar 3,21 persen. Ironisnya, tamparan inflasi yang demikian keras terjadi ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang cukup tajam.

Dilema ini merupakan cerminan dari sifat perekonomian Riau yang secara fundamental kurang terstruktur dengan baik. Sektor-sektor basis di Riau berkembang tak terkendali. Perkebunan sawit marak dimana-mana tetapi tidak didukung oleh kesiapan kelembagaan pada tingkat petani yang memadai. Akibatnya, struktur pasar membentuk pola kartel yang sangat oligopsonis. Di sektor pertambangan pemerintah hanya mengejar PAD dan itupun tidak terkelola dengan baik. Sumber-sumber energi ini hanya diarahkan untuk kepentingan kapitalis semata tanpa mempertimbangkan secara matang sinerginya terhadap sektor lain. Parahnya lagi, pengelolaan sektor pertambangan banyak berkait-kelindan dengan kepentingan-kepentingan penguasa. Penambangan liar meraja lela karena disekitarnya berkeliaran aparat yang memungut rente meskipun keberadaan tambang-tambang liar itu telah sangat merusak keseimbangan ekosistem.

Ke sektor hilir, dibidang properti terjadi perkembangan yang sangat masif di perkotaan. Penataan yang didukung oleh peruntukan ruang yang valid tidak dilakukan. Hotel-hotel bertaburan dan ruko-ruko muncul dimana-mana. Aspek bisnis dan kelayakan pasarnya tidak menjadi pertimbangan dalam proses perizinannya. Selain telah menimbulkan dampak-dampak lingkungan yang parah maka investasi yang tak terukur secara ekonomi tersebut tidak akan mampu menciptakan kualitas pembangunan ketenagakerjaan dalam jangka panjang. Justru booming sesaat bisnis tersebut hanya akan memancing

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



datangnya migrasi resin dan semakin akan menumpuklah para penganggur di perkotaan.

Ke depan, diperlukan upaya yang terstruktur dan optimal dalam manajemen pembangunan di Riau, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Perlu ada kebijakan pembangunan ekonomi yang komprehensif dan sinergis untuk ditangani bersama oleh setiap struktur pemerintahan. Sayangnya gubernur terpilih nantinya pada tahun-tahun awal akan dihadapkan pada struktur APBD yang kurang baik dari aspek manfaat. Tarik ulur eksekutif dan legislatif meronakan adanya kepentingan “bagi-bagi kue” APBD. Muaranya adalah anggaran yang tidak optimal jika dikaitkan dengan kepentingan strategis perbaikan ekonomi Riau, khususnya pada level akar rumput. Pemilu legislatif 2014 menjadi faktor yang mendorong terjadinya APBD yang hanya mengedepankan selera dan hasrat sesaat rakyat dan wakil rakyat, bukannya kepentingan pemberdayaan rakyat secara strategis dan berkesinambungan.

Lima tahun yang akan datang, yakni 2014-2019 sebenarnya merupakan fase akhir dari waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi Riau 2020. Sayangnya, selama sepuluh tahun terakhir program pembangunan di Riau lebih bernuansa “selera-isme” elit penguasa ketimbang meletakkan dasar-dasar yang kokoh agar perekonomian rakyat berkembang secara alami dalam sistem yang lancar dan terkendali secara inheren. Infrastruktur dasar yang diperlukan untuk membuat fundamen perekonomian menguat dan kokoh dibuat terbengkalai. Justru yang dilakukan adalah upaya-upaya “melompat” dengan membenamkan investasi yang besar-besaran tetapi pada tumpuan yang rapuh sehingga yang terjadi adalah keterpurukan dan tenggelam pada “hutang-piutang” yang entah kapan dapat diselesaikan. Begitu banyak aset-aset yang ditumbuhkan tetapi tak berguna bagi menopang kehidupan ekonomi rakyat. Berbagai program dikumandangkan dan dikayuh namun pada akhirnya hanya menuai kerugian dan beban berkepanjangan.



Riau tak harus meratapi itu semua. Diperlukan kesadaran bersama untuk memulai kembali langkah-langkah strategis bagi menempatkan Riau pada posisi terdepan. Tidak hanya pada aspek pertumbuhan ekonomi, lebih penting dari itu adalah pada pemerataan ekonomi. Kue ekonomi harus mampu didistribusikan dengan baik kepada berbagai lapisan masyarakat agar timbul pola kebersamaan sehingga dinamika perekonomian bergerak pada tumpuan yang kokoh. Kunci ada pada kesiapan pemerintah untuk tidak populis dengan lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur, pengembangan kelembagaan ekonomi menuju kekuatan yang kian berimbang dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbasis pada skill dan keterampilan masa datang. Bukannya menebar mimpi untuk balik ke masa lalu dan bukan pula menabur angan yang jauh dari jangkauan. Semangat..!

\*\*\*\*\*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
  2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Kedepan perekonomian Riau masih akan dihadapkan pada beberapa tantangan klasik. *Pertama*, persoalan politik di Riau tahun 2013 sejalan dengan akan diselenggarakannya PILGUBRI dan menghadapi agenda politik nasional tahun 2014. Petarung-petarung politik di Riau tentunya akan saling berebut pengaruh dan ongkosnya akan meningkat. Konsekwensi logisnya adalah “pengaplingan anggaran” dalam APBD oleh kalangan eksekutif yang lebih tertuju pada syahwat politik ketimbang pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.



# ANALISIS EKONOMI RIAU 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Bank Indonesia Pekanbaru dalam kajian dan perkiraannya masih melihat optimis terhadap perekonomian Riau tahun 2012 dan prospeknya di tahun 2013 mendatang. Pada triwulan ketiga 2012 ekonomi Riau tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, yakni 4,06 persen dengan migas dan 8,26 persen tanpa migas. Namun di triwulan keempat justru diprediksi lebih rendah yakni 3,8 persen dengan migas dan tanpa migas akan berkisar antara 7,4 sampai dengan 7,9 persen. Sumber pertumbuhan yang utama masih terletak pada sektor *non-tradables*. Ini berarti perekonomian Riau masih mengandalkan sektor perdagangan, pengangkutan dan jasa sebagai penggerak utamanya, namun sangat temporer sifatnya. Industri pengolahan kurang berkembang dengan baik.

Dari sisi penggunaan sumber penggerak pertumbuhannya adalah dari sektor konsumsi masyarakat. Dampak langsung dari penyelenggaraan PON VII tahun 2012 ini adalah naiknya permintaan masyarakat akan konsumsi bahan pangan, pakaian dan perlengkapan. Sementara ekspor justru mengalami anjlok sangat signifikan, yakni turun sebesar 37,74 persen. Keadaan ini memberi sinyal bahwa potensi perekonomian daerah yang bersumber dari hasil-hasil perkebunan dan kehutanan dihadapkan pada prospek ekonomi yang kurang cerah dan mengakibatkan kian lemahnya perbaikan pendapatan masyarakat. Berbalikan dengan itu pengeluaran menjadi bertambah akibat dorongan untuk itu sangat besar



sehingga kualitas pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi kurang memadai khususnya dalam membuka lapangan kerja jangka panjang.

Kurang bergairahnya tradables industry di Riau juga dapat diamati dari alokasi kredit perbankan. Kredit investasi dan modal kerja tidak tumbuh signifikan. Hanya kredit konsumsi yang kian membengkak. Loan to Deposit Ratio (LDR) justru menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni dari 80,1 persen pada triwulan kedua menjadi 78,35 persen pada triwulan ketiga. Kondisi ini cenderung akan makin melemah sejalan dengan belum begitu pulihnya perekonomian global. Kredit untuk UMKM dikelompok usaha kecil dan menengah justru berkurang walaupun pada usaha mikro terjadi sedikit kenaikan. Namun yang mengkhawatirkan adalah naiknya Non Performing Loans (NPL), baik untuk kredit secara keseluruhan yang meningkat dari 2,35 persen menjadi 2,76 persen, maupun kredit UMKM dari 3,16 persen menjadi 3,80 persen. Perlu pula disadari bahwa kredit untuk sector perkebunan di Riau pada triwulan ketiga 2012 justru mencapai Rp 6,43 triliun.

Yang patut dicatat adalah justru menurunnya tingkat inflasi. Pada triwulan ketiga 2012 hanya sebesar 4,21 persen di Kota Pekanbaru dan 3,47 persen di Kota Dumai. Padahal pada triwulan sebelumnya inflasi di Kota Pekanbaru mencapai 5,67 persen dan di Kota Dumai sebesar 4,38 persen. Jika diamati sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi penggunaan yang terletak pada meningkatnya konsumsi masyarakat, khususnya pada bahan makanan, pakaian dan perlengkapan serta didorong pula oleh adanya perayaan-perayaan hari besar, maka penurunan tingkat inflasi seperti mengindikasikan meningkatnya impor untuk barang keperluan tersebut sehingga keseimbangan pasar antara pasokan dan permintaan masih stabil. Berarti sejak Juli 2012 Riau kian dibanjiri oleh para pedagang musiman dari berbagai daerah untuk mengeruk keuntungan di ranah Riau. Kini membludaknya pedagang kaki lima (PKL) seakan memperkuat hipotesis ini.

Dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dikumpulkan perbankan di Riau meningkat sangat signifikan, yakni dari Rp 50,314 triliun menjadi





Rp 53,45 triliun. Sayangnya, peningkatan DPK tersebut hanya bersumber dari naiknya Giro sehingga bersifat jangka pendek. Bila dikaitkan dengan semakin besarnya sisa anggaran pembangunan maka ada kecenderungan peningkatan DPK dalam bentuk Giro bersumber dari Giro Pemerintah Daerah yang masih nyangkut diperbankan. Provinsi Riau saja untuk tahun 2011 mempunyai SILPA mencapai Rp 1,028 triliun. Berdasarkan catatan Bank Indonesia Pekanbaru realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah Riau sampai triwulan ketiga 2012 baru mencapai 40,09 persen. Lambannya realisasi anggaran belanja ini membuat dana tersebut mengelantung di perbankan dan pencairan yang “jor-joran” pada triwulan keempat dapat berdampak pada minimnya kualitas hasil-hasil pembangunan.

Kedua, depan perekonomian Riau masih akan dihadapkan pada beberapa tantangan klasik. *Pertama*, persoalan politik di Riau tahun 2013 sejalan dengan akan diselenggarakannya Piligubri dan menghadapi agenda politik nasional tahun 2014. Petarung-petarung politik di Riau tentunya akan saling berebut pengaruh dan ongkosnya akan meningkat. Konsekwensi logisnya adalah “pengaplingan anggaran” dalam APBD oleh kalangan eksekutif yang lebih tertuju pada syahwat politik ketimbang pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Dampaknya dalam jangka panjang adalah kurang tersentuhnya kebutuhan infrastruktur ekonomi dan minimnya pemeliharaan terhadap yang sudah ada. Artinya, ongkos ekonomi rakyat tidak akan mengecil sehingga ketersediaan modal sendiri untuk kepentingan investasi tidak akan bertambah secara signifikan.

*Kedua*, perebutan pengaruh politik juga akan rawan memicu konflik. Di pedesaan akan kian diwarnai oleh meningkatnya tensi konflik lahan. Bila selama ini hanya dipicu oleh perebutan lahan maka pada tahun 2013 akan semakin memanas lagi oleh adanya perbedaan kandidat yang diusung. Di wilayah perkotaan akan ditandai oleh tarik ulur kebijakan penanganan pedagang kaki lima (PKL). Perbedaan pandangan antara Wali Kota Pekanbaru dengan DPRD tentang PKL merupakan contoh kongkrit lemahnya strategi pembangunan dalam masalah tersebut dan



pangkalnya tentu berpunca dari persoalan mencari pengaruh politik. Muara dari semua itu adalah terganggunya dinamika ekonomi akibat meningkatnya ketidak-pastian, baik dalam berusaha maupun dalam melakukan prediksi-prediksi bisnis ke depan. Ongkos ekonomi yang timbul akibat konflik-konflik ini meningkat sejalan dengan naiknya ongkos-ongkos social yang timbul dalam persoalan tersebut. Semuanya menimbulkan kerentanan ekonomi yang dapat menghambat percepatan pertumbuhan dan pemerataannya.

Ketiga, kelemahan internal Riau yang bersumber dari kurang mendukungnya infrastruktur ekonomi. Pelabuhan-pelabuhan rakyat yang tidak memadai dan belum mampu menjadi sumber pendapatan daerah masih akan menjadi kendala kelancaran distribusi barang dan jasa. Ditambah lagi oleh memburuknya infrastruktur jalan dan jembatan serta makin padatnya kendaraan disatu sisi menyebabkan ongkos transportasi yang kian mahal. Peningkatan ongkos transportasi ini membuat harga-harga barang produksi maupun konsumsi yang beredar di Riau menjadi lebih mahal. Ini akan menekan keunggulan bersaing Riau dalam menggerakkan sektor *tardables*. Basis penguatan ekonomi masih akan tertuju pada sektor pertanian dengan nilai tambah pada masyarakat yang sangat rendah jika dibandingkan oleh apa yang didapat para eksportir CPO. Industri-industri pengolahan sulit untuk tumbuh dan lapangan kerja yang lebih permanen tidak kan berkembang pesat.

Keempat, pemulihan ekonomi global masih merangkak sehingga antisipasi terhadap itu masih membuat para pengusaha bersikap "*wait and see*". Eksportir Riau yang hanya ditopang oleh komoditas minyak nabati dan kertas tetap akan melambat dan itu bisa berdampak pada statisnya daya beli masyarakat mengingat sebahagian besar masyarakat yang menggantungkan pendapatannya dari sektor perkebunan masih akan terimbas oleh rendahnya harga jual mereka.

Kelima, fokus pembangunan Riau masih akan terarah kepada keberhasilan Riau menyelenggarakan Islamic Solidarity Games (ISG) pada paruh pertama 2013. Resonansinya masih akan bersifat jangka pendek





dan dorongannya terhadap peningkatan konsumsi masyarakat akan tetap tinggi. Selain berdampak positif bagi sektor-sektor tersier dampak negatifnya pada penguatan struktur ekonomi berbasis industri tetap lemah.

Dari kelima aspek tersebut titik cerah perekonomian Riau masih ada dan dapat dijadikan patokan untuk mengembangkan dinamika perekonomian. Kucuran dana APBD yang mencapai Rp 27 triliun lebih seluruh Riau merupakan pemicu yang seharusnya sangat hebat bagi pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang, walaupun relatif tinggi, namun stabil pada angka kisaran 4,5 persen juga menjamin “temperatur” ekonomi daerah. Tingkat bunga perbankan yang kian rendah menyebabkan tensi ekonomi masih akan normal dan nilai tukar yang tidak bergejolak menyebabkan jantung perekonomian secara umum masih akan berdenyut dengan irama yang apik. Ekonomi Riau dari aspek pertumbuhan masih akan tetap menjanjikan dan diperkirakan akan berkisar pada putaran 7,7 persen sampai dengan 8,5 persen.

Riau masih sangat berharap akan membaiknya pasar global khususnya untuk komoditas CPO sehingga akan mampu mengangkat harga TBS dan menjadi pemicu naiknya pendapatan masyarakat. Ini sangat urgen sifatnya karena sejak lama perekonomian Riau dari sisi konsumsi sangat tergantung dari sektor konsumsi masyarakat. Naiknya harga sawit akan sangat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Bila didukung oleh pembangunan sistem transportasi yang memadai maka tidak tertutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi Riau akan kian melejit dan pemerataannya dapat dilakukan berdasarkan basis wilayah yang ada. Sambutlah ISG, PILGUBRI dan agenda politik lainnya dengan budaya politik yang bernuansa Melayu sehingga kehadirannya dapat kian menumbuhkan optimisme pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Semoga.!!!

\*\*\*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

**Mengatasi hal tersebut diharapkan dengan adanya kepastian dari hasil Pilgubri menjelang 2014 menjadi titik awal menuju perbaikan. Orientasi utamanya adalah optimalisasi APBD sehingga setiap rupiah uang rakyat dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata.**



## ANALISIS KEBERKEMBANGAN EKONOMI GUBERNUR RIAU TERPILIH

Perkembangan ekonomi Riau sejak 5 (lima) tahun terakhir senantiasa tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2008 dengan Migas ekonomi Riau tumbuh sebesar 5,65% dan tanpa Migas sebesar 8,06%, sementara tahun 2012 dengan Migas sebesar 3,55% dan tanpa Migas sebesar 7,82%. Rendahnya pertumbuhan tahun 2012 terjadi sebagai akibat krisis ekonomi global. Berbagai komoditas andalan ekspor Riau mengalami penurunan permintaan di pasar internasional sehingga berimbas pada berkurangnya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya menurunkan daya beli rakyat.

Selanjutnya jika dilihat dari sisi lapangan usaha, perkembangan PDRB dengan migas Riau, maka sektor bangunan, pengangkutan dan komunikasi serta jasa-jasa mengalami dinamika peningkatan yang konsisten sejak tahun 2009 hingga tahun 2012. Sektor bangunan mengalami perubahan pertumbuhan yang relatif tinggi, yakni 8,62% pada tahun 2009 menjadi 14,13% pada tahun 2012. Pertumbuhan yang terjadi pada sektor ini tidak terlepas dari pengaruh pembangunan berbagai sarana ada prasarana penyelenggaraan PON XVIII yang selanjutnya mendorong tumbuhnya berbagai aktifitas pada sektor pengangkutan dan komunikasi serta jasa-jasa. Termasuk pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mengalami pertumbuhan mencapai 16,02%.

Perkembangan PDRB Riau tanpa Migas per sektor kurun waktu 2009-2012 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2009



tumbuh sebesar 6,44 % sedangkan tahun 2012 mampu tumbuh mencapai 7,82 %. Sektor pertambangan dan penggalan, diluar minyak dan gas, yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah pada tahun 2009 tumbuh sebesar 3,07% dan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi sebesar 1,11%. Hal tersebut terjadi akibat semakin menipisnya cadangan mineral pertambangan dan galian C serta sumber-sumber tambang yang semakin menipis.

Pada tahun 2012 sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yakni sebesar 16,02 %. Diikuti oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang tumbuh sebesar 14,21 %, dan sektor bangunan dengan tingkat pertumbuhan mencapai 14,13%. Sektor pertanian pada tahun 2012 hanya mampu tumbuh sebesar 2,46 % yang berarti lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang mampu tumbuh sebesar 3,64 %.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau dengan Migas menurut harga berlaku, secara konsisten mengalami peningkatan dari Rp. 276.400,11 milyar pada tahun 2008 menjadi Rp. 469.073,02 milyar pada tahun 2012. Sektor pertambangan dan penggalan memberikan peran yang paling besar dalam struktur perekonomian Riau dari sisi penawaran, yakni rata-rata sebesar 36,95%. Diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 19,21 % dan sektor pertanian sebesar 18,19 %. Keadaan ini menunjukkan bahwa ciri perekonomian Riau masih berpijak pada sektor primer. Padahal pertumbuhannya relatif kecil dan sudah mengalami penurunan. Namun demikian sebagian besar masyarakat Riau bekerja disektor primer tersebut, khususnya sektor pertanian dalam sub-sektor perkebunan.

Dari sisi penggunaan struktur PDRB Riau didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga. Tahun 2008, kontribusinya sebesar 49,99% dan naik menjadi 51,13% pada tahun 2009. Pada tahun 2010 meningkat lagi menjadi 52,59%, sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 50,66% dan pada tahun 2012 kembali turun ke level 48,71%. Pada tahun 2013 triwulan I kontribusi Konsumsi Rumah Tangga masih



sebesar 29,35%. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat Riau selama tahun 2008 hingga tahun 2013 masih cukup baik, bahkan terlalu dominan dalam menopang perekonomian daerah.

Pembentukan modal tetap bruto yang menggambarkan pengeluaran untuk investasi barang modal, memiliki peran yang cukup signifikan dalam PDRB tanpa migas Riau. Kontribusi yang diberikannya pada tahun 2012 mencapai 20,66%. Sementara, konsumsi pemerintah dalam beberapa tahun terakhir hanya memberikan kontribusi sebesar 9,37% pada tahun 2012 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2008 yang mampu memberikan kontribusi mencapai 12,38%. Perdagangan internasional netto yang digambarkan dari selisih ekspor dan impor, masih menunjukkan kinerja yang baik. Pada Triwulan I Tahun 2013 mampu berkontribusi sebesar 19,63 %, sedangkan pada tahun 2008 baru sebesar 11,18%. Tingginya konsumsi masyarakat, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), belanja pemerintah dan diimbangi oleh neraca ekspor yang baik dan tinggi, menunjukkan bahwa kekuatan perekonomian Riau berasal dari pasar domestic dan juga pasar internasional.

Sedangkan pertumbuhan PDRB tanpa Migas Riau berdasarkan komponen penggunaan masih didominasi oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto. Pada tahun 2008 komponen ini hanya tumbuh sebesar 8,82 % dan pada tahun 2012 telah mencapai 12,97 %. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebagai komponen yang memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2008 tumbuh sebesar 8 %. Namun pada tahun 2012 sedikit mengalami perlambatan dengan pertumbuhan hanya sebesar 6,93 %. Pada Triwulan I tahun 2013 membaik kembali dan mampu tumbuh sebesar 7,55 %.

Memasuki tahun 2014 mendatang perekonomian Riau akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak kecil yang akan menjadi pekerjaan rumah utama bagi Gubernur Riau terpilih. *Pertama*, dinamika politik yang kian tinggi tensinya sehingga akan mempengaruhi keputusan pebisnis dan investor untuk menanamkan modalnya. *Kedua*, infrastruktur dasar yang masih kurang mendukung untuk pengembangan ekonomi yang



lebih merata sehingga ketimpangan masih akan sulit diminimalisir. *Ketiga*, konflik-konflik lahan kian meningkat yang dapat menurunkan kenyamanan berbisnis. *Keempat*, inflasi yang masih tinggi akibat ketergantungan Riau dalam komoditas pangan pada pemasok luar. *Kelima*, kepastian hukum, terutama menyangkut RT RW, yang membuat hambatan-hambatan bagi masuknya investasi baru. *Keenam*, kesadaran birokrasi akan pelayanan yang optimal yang masih rendah.

Untuk mengatasi hal tersebut diharapkan dengan adanya kepastian dari hasil Pilgubri menjelang 2014 menjadi titik awal menuju perbaikan. Orientasi utamanya adalah optimalisasi APBD sehingga setiap rupiah yang rakyat dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata. Riau perlu melakukan konsolidasi antar wilayah dan antar kelompok masyarakat dalam mengimplementasikan pembangunan. Kebutuhan swasta, kepentingan masyarakat dan peran pemerintah harus disinergikan, agar masing-masing pihak tidak berjalan sendiri-sendiri, untuk mencapai hasil yang optimal. Riau harus lebih memfokuskan pembangunan sentra-sentra industri yang telah dirancang sebelumnya agar benar-benar berfungsi dalam mendukung diversifikasi komoditas, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun ekspor.

Terakhir, masyarakat bisnis, terutama UMKM memerlukan kepastian berusaha yang jelas dan tegas dari pemerintah, baik melalui grand strategi pembangunannya maupun dalam aspek konsistensi pelaksanaannya. Kenyamanan dan kepastian usaha hanya akan diperoleh dari pemerintahan yang berwibawa dan amanah dalam mengemban harapan rakyat. Aparat penegak hukum haruslah menjadi tauladan dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil. Harapan Riau untuk tahun-tahun mendatang bukan terletak dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi pada kualitas pertumbuhan ekonomi itu yang diukur dari seberapa jauh masyarakat dapat menikmatinya secara merata dan membuka lebih banyak kesempatan kerja.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.







## 55 TAHUN RIAU: DARI 5 PILAR, K2I, PON SAMPAILAH DI KPK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Rakyat Riau menancapkan harapan besar dengan menyepakati visi bersama untuk menempatkan diri pada titik sentral peradaban yang secara ekonomi memiliki kesejahteraan tinggi yang kian menampakkan identitasnya sebagai masyarakat Melayu. Riau Sebagai Pusat Perekonomian dan Budaya Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis di Asia Tenggara Tahun 2020 adalah mimpi yang ingin diwujudkan. Ada optimisme untuk sampai pada kondisi seperti itu. Sumber daya yang berlimpah, pola baru pemerintahan Indonesia dengan kebijakan desentralisasi fiskal menjadi modal dasar yang memadai bila digunakan secara efisien dan efektif.

Pada usia Riau yang ke 55 tahun sekarang ini, yang berarti kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah pula berjalan lebih sepuluh tahun, dana yang dikucurkan ke Riau cukup fantastic. Triliunan rupiah dana mengalir ke pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Pemanfaatannya lebih leluasa diberikan kepada daerah sebagai konsekwensi dari otonomi daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat melalui lahirnya kebijakan-kebijakan pembangunan yang lebih dekat dan menyentuh kebutuhan rakyat. Kesejahteraan social rakyat dapat berarti keadaan dimana rakyat merasa nyaman, tentram, bahagia, serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 yang dimaksud dengan kesejahteraan social adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,



spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Definisi tersebut sangat tegas dan mengandung konsekwensi bahwa yang harus dicapai bukan hanya sekedar seseorang memiliki kondisi dimana ia mampu memenuhi segala kebutuhan materialistiknya tetapi juga bagaimana dalam keadaan itu ia mampu memainkan peranannya menumbuhkan kesejahteraan social itu sendiri untuk dirinya dan orang lain (mampu melaksanakan fungsi sosialnya). Keadaan inilah yang menjadi substansi Visi Riau 2020 dalam bingkai Kebudayaan Melayu yang lestari. Lantas sudah sejauh mana Riau menapak untuk sampai kesana dengan tantangan waktu yang tinggal delapan tahun lagi ?

Berbagai kebijakan di level provinsi sudah ditaja untuk mewujudkan mimpi besar Riau tersebut. Pada awal reformasi dikumandangkanlah *Lima Pilar* pembangunan dengan program inti pemberdayaan ekonomi rakyat. Tapak-tapak kemajuan daerah ditumbuhkan dengan mendirikan Fakultas Kedokteran dilengkapi dengan perbaikan RSUD, renovasi Mesjid Agung An Nur dan lain sebagainya Termasuk mendirikan beberapa perusahaan daerah sebagai penyangga kemajuan ekonomi daerah, seperti RAL, PT. PIR dan PT. PER. Sejak akhir tahun 2003 kebijakan-kebijakan tersebut seperti terhalau dengan ditaja nya program baru yang dikenal dengan selogan K2I.

Sejak tahun 2009 program K2I ini ternyata kian sayup pula terdengar akibat gelegar hasrat menaja PON XVIII tahun 2012 dan ISG 2013 Kebun sawit untuk rakyat tinggal cerita, keramba ikan dan pabrik pengolahannya hanya sampai pada peletakan batu pertama yang selanjutnya tetap membatu tanpa mampu menghasilkan apa-apa bagi pengentahan kemiskinan. RAL pun bangkrut. Dua hari menjelang upacara peringatan 55 tahun Provinsi Riau, rakyat Riau terunyah menyaksikan Gubernur Riau (dengan berbusana Melayu ) menjadi saksi bagi beberapa anggota legislatif Riau yang menjadi “pesakitan” dalam sidang tindak pidana korupsi KPK. Akan kah pula beliau menjadi tersangka ?

Ironis sekali suasana hati rakyat menyaksikan pentas ini. Dalam



Apakah Riau terjebak dalam apa yang disinyalkan oleh Peter Drucker (1997) bahwa kita sangat asyik mendiskusikan apa yang harusnya dilakukan pemerintah bukannya mempertanyakan apa yang dapat dilakukan pemerintah. Peran pemerintah dalam Negara yang demokratis dan pemerintahan yang partisipatoris justru harus ditiadakan. Pemerintah memang harus membangun generator ekonomi tetapi harus jelas dan terukur implikasinya agar tidak sekedar mengejar pertumbuhan. Investasi di sektor public menekankan pada outcomes dan bukannya mengejar ukuran kinerja ekonomi semata.

Sidang-sidang KPK menjelang dan pada peringatan ulang tahun Riau ke-25 ini semoga saja mampu mengetuk pintu hati semua lapisan masyarakat dan para pemimpinnya bahwa menentukan prioritas



pembangunan dan mengarahkan orientasinya hendaklah dilakukan secara terukur, berakal dan konsisten. Mengambil keputusan pembangunan adalah merupakan proses pertimbangan yang panjang dan seharusnya melibatkan banyak komponen masyarakat. Untuk Riau dewasa ini sangat diperlukan membangun komitmen bersama dalam menentukan prioritas dan secara sabar meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi upaya melakukan lompatan ke depan pada tahap berikutnya. Bukannya melakukan lompatan dengan *big push investment* pada sektor hilir sementara infrastruktur dan kondisi sosial masyarakat sangat rapuh untuk dijadikan landasan berpijak.

Sepuluh tahun pertama mengenyam otonomi daerah dan desentralisasi fiskal nampaknya Riau terperangkap dalam dampak otonomi tersebut bukannya kian menjadi smoothing dalam proses pembangunannya. Pemimpin-pemimpin Riau menjadi kian berselera untuk menumpahkan birahi selebritisnya dan hasrat-hasrat memancang nama pada berhala-berhala modern yang dibangunnya, apakah itu dalam bentuk gedung-gedung mewah dan tugu-tugu ataupun atas nama kesejahteraan rakyat membangun prasarana pemenuhannya secara berlebihan, seperti mesjid, rumah sakit dan lain sebagainya. *Investment appraisal* dari belanja modal pemerintah hampir tak dapat ditemui dan alokasi untuk belanja rutin guna melayani aparatur pemerintah dalam bekerja justru kian membengkak.

Tidak ada kata terlambat bagi Riau untuk berbenah. Delapan tahun ke depan adalah peluang yang tersisa. *Big push investment* mesti dilakukan tetapi bukan berorientasi perkotaan. Riau harus mampu merajut wilayah dengan berinvestasi pada infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas. Ini penting untuk rakyat bisa saling mengisi, dari pesisir ke daratan dan dari daratan mengalir ke pesisir. Administrasi pemerintahan dapat sudi mekarkan dengan persatuan budaya yang tak terpisahkan. Strategi lompatan (*ploy strategy*) dalam pelaksanaan pembangunan secara konsekwen dan konsisten diarahkan pada industri hilir dan *tradable industry* tetapi pada pijakan dasar yang kokoh. Manfaatkan setiap rupiah



- uang rakyat untuk kepentingan pemberdayaan dalam arti komprehensif, tidak hanya sekedar slogan. Redistribusi asset ekonomi secara terencana dan sinergis menjadi sesuatu yang tak dapat dikesampingkan, khususnya lahan yang saat ini intensitas konfliknya kian mencemaskan.
- Pemberdayaan manusia untuk mampu menjawab tantangan dalam mewujudkan Visi Riau 2020 mesti dimulai dari kerangka pengembangan kreativitas dan kewirausahaan rakyat, khususnya pada kemampuan mengelola sumberdaya lokal secara berkesinambungan. Riau harus mengembangkan ekonomi alternatif dan kuncinya ada pada perguruan tinggi yang berkualitas yang ditopang oleh pendidikan dasar dan menengah yang bermutu pula.
- Pada akhirnya, yang telah terlanjur haruslah disikapi secara bijaksana. Tangan mencincang bahu memikul dan malu ditanggung bersama. Walau nantinya para pemimpin Riau akan banyak yang bergelimpangan di tangan KPK semangat membangun daerah tak luntur. Ini adalah pelajaran dan barang siapa yang mampu menggunakan pelajaran-pelajaran itu dengan baik dan untuk hal-hal yang baik maka yakinlah ujungnya adalah menuai kebaikan pula. ....semoga !!!
- \*\*\*
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

PADA SISI LAIN YANG LEBIH MENCEMASKAN ADALAH PERSPEKTIF DAN HARAPAN PARA PENGUSAHA SENDIRI YANG MENJALANKAN BISNISNYA DI RIAU. SURVEY YANG DILAKUKAN BANK INDONESIA PEKANBARU PADA TRIWULAN III TAHUN 2019 JUSTRU MEMBERIKAN JAWABAN BETAPA KIAN PESIMISNYA PARA PELAKU USAHA DI RIAU SELAMA SATU TAHUN TERAKHIR.





## EKONOMI RIAU 2020; DEGELEMAK PEAK ?

Banyak pakar memperkirakan perang dagang antara Amerika dan China sudah akan usai tahun 2020 ini. Paling tidak tensi dan tekanannya terhadap perekonomian berbagai negara akan menurun. Ciutan Trump memberikan sinyal positif untuk itu. Pelaku ekonomi pun mempersepsikan itu sebagai momentum untuk perbaikan. Bagi Indonesia sendiri nampaknya sudah mulai agak kebal dengan perseteruan tersebut. Nilai tukar rupiah dalam resonansi ekonomi global justru sedikit membaik. Mungkin pelaku ekonomi mulai yakin akan ekonomi kekinian dan prospeknya dimasa yang akan datang. Carut marut politik bukan untuk diseduh sepanjang musim. Mesin ekonomi harus diputar supaya pundi-pundi dana tidak terkuras dan *bankrupt*. Pebisnis harus tetap berfikir keras agar tetap eksis meskipun harus banting strategi atau bahkan berpindah-pindah lapangan usaha.

Bagi Riau, baik pelaku usaha maupun masyarakat prospek ekonomi tahun 2020 memang masih penuh tanda tanya. Setahun terakhir perekonomian Riau diliputi kinerja yang sedikit mencekam. Pada triwulan ketiga tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Riau justru lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya. Laporan perekonomian Riau yang dirilis Bank Indonesia Pekanbaru mencatat pertumbuhan ekonomi Riau Oktober 2019 hanya 2,74 persen. Lebih rendah dari kondisi Oktober 2018 yang tumbuh sebesar 2,94 persen. Melemahnya perekonomian Riau menjadi tantangan besar untuk bangkit merebut peluang ke depannya.



Lebih menyakitkan lagi pada sisi lain justru tingkat inflasi lebih tinggi. Pada Oktober 2018 tingkat Inflasi di Riau hanya sebesar 2,45 persen. Masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi ketika itu. Berbeda dengan kondisi pada Oktober 2019 inflasi meningkat menjadi 5,5 persen padahal pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 2,74 persen. Ini berarti tekanan kehidupan ekonomi rakyat semakin berat dan dapat kian memperparah kemiskinan. Harga-harga yang lebih mahal tentunya akan semakin sulit dijangkau dengan perolehan nilai tambah ekonomi yang tidak memadai. Implikasinya adalah pada penurunan daya beli rakyat. Muaranya akan Nampak kembali pada kemerosotan ekonomi karena selama ini pertumbuhan ekonomi Riau dari sisi penggunaan banyak diopang oleh konsumsi rumah tangga. Penurunan konsumsi ini akan semakin memberatkan bila harga-harga komoditas unggulan Riau tidak dapat didongkak.

Pada sisi lain, untuk menggerakkan perekonomian dapat juga dilakukan melalui intermediasi perbankan dalam bentuk pengucuran kredit pada para pelaku usaha dan masyarakat. Baik untuk kredit investasi, modal kerja dan konsumsi. Data Bank Indonesia mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan berdasarkan lokasi proyek jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Oktober 2018 kredit mampu tumbuh 21,78 persen sedangkan pada Oktober 2019 mengerut karena hanya tumbuh sebesar 2,22 persen. Ini terbukti dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang memang lebih rendah. Pada Oktober 2019 LDR turun menjadi 81,83 persen dari yang semula sebesar 83,24 persen. Ini artinya ekspansi kredit untuk membiayai usaha-usaha produktif rakyat dan kebutuhan-kebutuhan konsumsi masyarakat guna menaikkan daya beli kian melemah.

Pada hal nya lagi, kualitas aktiva bank justru makin memburuk. Posisi Oktober 2018 *Non Performing Loans* (NPLs) perbankan di Riau sebesar 2,73 persen sedangkan Oktober 2019 naik menjadi 2,95 persen. Meskipun masih dibawah standar yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) namun NPLs yang memburuk adalah cerminan perekonomian





yang kurang baik. Kekhawatiran terhadap ini kian kentara jika kita amati apa yang dialami Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Lembaga keuangan yang berfokus untuk melayani kelompok *in the bottom of the pyramid* ini, yakni kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, masyarakat pinggiran, maupun masyarakat dengan usaha-usaha ekonomi yang mikro dan kecil, performanya juga mencemaskan. NPL DR meningkat dari 91,12 persen pada Oktober 2018 menjadi 98,31 persen pada Oktober 2019. Sakitnya kualitas aktivanya juga semakin memburuk dimana pada posisi yang sama NPL nya naik dari 11,72 persen menjadi 13,09 persen.

Pada sisi lain yang lebih mencemaskan adalah perspektif dan harapan para pengusaha sendiri yang menjalankan bisnisnya di Riau. Survey yang dilakukan Bank Indonesia Pekanbaru pada Triwulan III tahun 2019 justru memberi sinyal betapa kian pesimisnya para pelaku usaha di Riau selama satu tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan turunnya Saldo Bersih Likuiditas Perusahaan dari 30,59 persen pada TW III 2018 menjadi hanya sebesar 25,47 persen pada TW III 2019. Saldo Bersih Timbangan Kegiatan Usaha melorot dari 19,17 persen menjadi 14,3 persen. Kemampuan perusahaan mencetak laba merosot dari 27,41 persen menjadi 23,41 persen dan para pengusaha merasa bahwa setahun terakhir ini kemudahan mengakses kredit justru semakin sulit yang ditandai dengan penurunan indeks dari 6,89 persen tahun 2018 menjadi hanya 4,8 persen di tahun 2019.

Pertambahan tersebut justru terjadi pada usaha-usah di sektor yang selama ini memiliki kontribusi besar dalam struktur perekonomian Riau dan terkait dengan sumber kehidupan rakyat seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan perdagangan, serta hotel dan restoran. Di sektor pertanian dalam arti luas tersebut ke depan justru diperkirakan akan terjadi kontraksi karena melemahnya permintaan akan komoditas di pasar dunia. Akibatnya, pengangguran akan meningkat, pendapatan masyarakat kian menurun dan persoalan-persoalan sosial



akan makin pula.

Memang, kondisi-kondisi masa lalu tersebut sudah sewajarnya pemerintah semakin berperan dalam menstimulus perekonomian di Riau secara terencana dan konsisten. Bila tidak maka peluang-peluang ekonomi yang terbuka, baik di tataran global maupun nasional tidak akan mampu ditangkap secara optimal. Apalagi semakin besar peluang maka semakin besar pula tantangan untuk memanfaatkannya. Setiap return yang diharapkan senantiasa diikuti risiko yang dihadapi untuk merealisasinya. *Pertama*, pemerintah harus menunjukkan kepemimpinan (*leadership*) yang baik untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. Kebijakan yang senantiasa berubah-ubah tanpa alasan yang jelas justru akan membingungkan pelaku bisnis dan masyarakat. *Kedua*, setiap kebijakan haruslah tidak lepas dari pendekatan proporsional dan professional agar ada rasa kepastian dari rakyat.

*Ketiga*, pemerintah harus memberi proteksi (*protection policy*) untuk usaha-usaha khusus yang menyangkut kepentingan masyarakat umum agar ada keterjangkauan secara efisien dan efektif. *Keempat*, perlu senantiasa dilakukan pemberdayaan (*empowerment*) terhadap pelaku-pelaku bisnis yang saat ini masih lemah namun memiliki prospek yang menjanjikan. *Kelima*, memupuk dan menumbuhkan inovasi rakyat untuk menciptakan produk-produk unggulan daerah yang *marketable* dan berkesinambungan. *Keenam*, pengembangan jejaring ekonomi melalui adanya kerjasama (*cooperation*) multi pihak untuk mendapatkan kinerja yang lebih tinggi.

*Ketujuh*, mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan (*skill and knowledge*) rakyat secara terkait dengan prospek usaha yang tersedia. *Kedelapan*, pengembangan usaha yang beraneka ragam (*diversity*) agar ada portfolio usaha yang dapat menjamin adanya pengalihan risiko. Selama ini selalu saja Riau bergantung pada satu komoditas. Lepas dari minyak bumi masuk ke minyak sawit. Tidak beragam hasil usaha rakyat yang dikembangkan sehingga Riau terperangkap dalam persoalan meletakkan telur dalam satu keranjang. *Kesembilan*, adanya *framework* yang benar dan disepakati bersama dalam membuat dan melakukan kebijakan serta

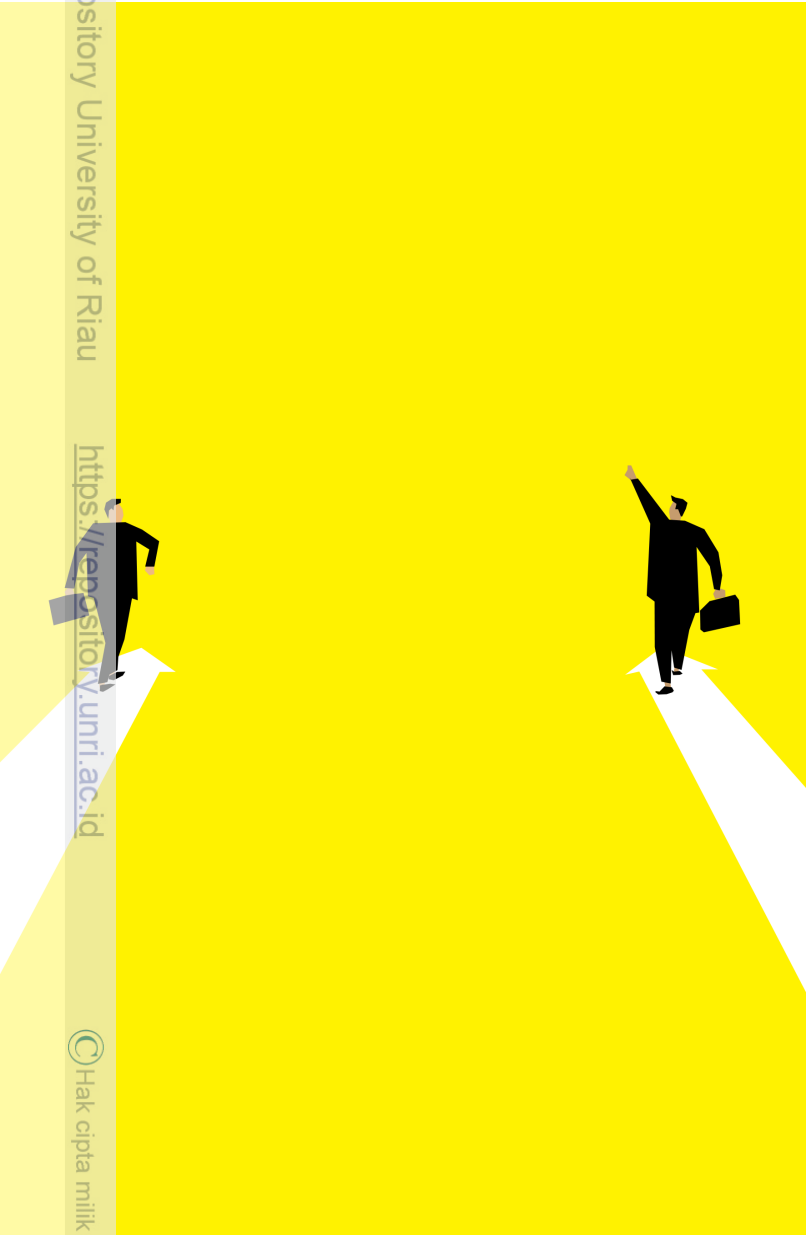


program pelaksanaannya. Usaha coba-coba dan tanpa adanya rencana yang baik maka hasilnya tentu tidak akan baik pula.

Untuk melakukan pembangunan daerah di Riau dengan hasil yang lebih optimal dan efisien perlu kiranya disadari secara mendalam bahwa sinergi merupakan kunci penting. Sebagai sebuah proses dimana pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sipil harus bekerjasama maka kepemimpinan untuk menemukan resultan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) mutlak diperlukan. Mungkin tidak akan popular mata beberapa orang atau tim sukses tetapi untuk menjamin semua sumberdaya pembangunan dan kapasitas lokal secara efisien dan efektif hal itu mestilah ditempuh. Pembangunan daerah itu harus bersifat holistic sehingga tidak hanya menyangkut dimensi ekonomi tetapi juga mencakup aspek sosial, politik-administratif, dan budaya. Manfaat bersama hanya akan mampu dituai dari implementasi semangat kerjasama dan sama bekerja. Bukannya dengan kebijakan dan keputusan-keputusan yang *begelemak* tanpa dapat dibutir nilai manfaatnya.

\*\*\*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



AKHIR HAYAT VISI RIAU 2020 TELAH TIBA. MIMPI ITU TERNYATA TERLALU INDAH. BEGITU SAMA TERLENA DENGAN MIMPI ITU SEHINGGA RIAU BUKANNYA MENJADI VOCAL POINT ASIA TENGGARA, MALAH MENJADI *BINCIT* DI SUMATERA.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



## AKHIR HAYAT VISI RIAU 2020

Has Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Tanpa terasa waktu berjalan dan masa bergulir tiada perduli pada sesiapa yang ada, sesiapa yang merasa ataupun yang kebas akan perisa. Ia tak kan berhenti walaupun ada yang terlindas. Ada yang tegak dan berjalan tegak ke depan ada yang tertatih-tatih menghela penderitaan. Namun pada dasarnya ada ruang dan kesempatan untuk berbuat dan mengisi selang waktu. Untuk memperbaiki diri dan membekalinya bagi kehidupan esok yang lebih baik. Atas kesempatan itulah perlu adanya tatanan dan tuntunan yang jelas. Mau dibawa kemana dan dalam bentuk seperti apa keadaan yang ingin diwujudkan pada beberapa waktu yang akan datang.

Itulah visi yang kemudian diturunkan ke dalam beberapa misi sebagai *chosen tracks* dalam mengejar visi dimaksud. Wikipedia menjelaskan;...*a mission statement is a short statement of why an organization exists, what its overall goal is, identifying the goal of its operation: what kind of product or service I provides, its primary customers or market, and its geographical region of operation. It may include a short statement of such fundamental matters as the organization's value or philosophy, a business's main competitive advantages, or a desired future state-the "vision".*

Di fase awal reformasi, Riau yang tidak ingin menjadi provinsi “kaleng-kaleng” dan merasa selama ini telah tergerus oleh “kezaliman” pemerintah pusat, bercita-cita ingin menjadi provinsi terkemuka. Untuk



merealisasinya maka dimulai dengan menentukan provinsi seperti apa dan masyarakat yang bagaimana yang akan diwujudkan paling tidak dalam dua puluh tahun mendatang. Lalu dirumuskanlah sebuah visi ke depan yang setelah melakukan perdebatan panjang dituangkan dalam Perda Nomor 35 Tahun 2001 yang berbunyi; Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan bathin di Asia Tenggara Tahun 2020. Sebuah visi yang sesuai dengan kondisi yang sungguh apik bila itu dapat direalisasi.

Apakah landasan berfikir ketika itu ? Adanya otonomi daerah merupakan dasar utama bagi Riau untuk memperoleh kesempatan membuat wilayah ini lebih mandiri dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan yang sesuai aspirasi masyarakat di daerahnya. Teori menyatakan bahwa semakin partisipatif kebijakan pembangunan diputuskan dan dilakukan maka semakin mendekati hasilnya keinginan dan kebutuhan stakeholdersnya. Kemudian, otonomi daerah ditindaklanjuti pula dengan adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Aturan ini memungkinkan Riau mendapat bagian dari sumber-sumber alam yang dieksploitasi di wilayahnya. Tidak tanggung-tanggung jumlah dana bagi hasil yang dapat dinikmati.

Meskipun itu belumlah sesuai dengan apa yang diinginkan. Namun jika dirata-ratakan hampir Rp 33,5 triliun Riau menerima kucuran dana bagi hasil setiap tahunnya, baik untuk provinsi maupun kabupaten kota. Jika dikalkulasikan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2020 ini maka total dana implementasi kebijakan perimbangan keuangan untuk Riau telah berjumlah hampir mencapai Rp 670 triliun. Sebuah jumlah yang fantastis untuk merubah Riau menjadi sebuah pusat perekonomian yang modern dan terkemuka. Alasan lain adalah kondisi geografis Riau yang berada di tengah poros perekonomian dunia dan lalu-lintas transportasi, baik nasional maupun internasional. Termasuk masih tersedianya sumber-sumber perekonomian yang potensial dan layak pasar.

Lalu apa yang terjadi ketika kini Riau telah memasuki gerbang waktu tahun 2020 ?. Terwujudkah visi dan misi yang dulu dicetuskan ?.





Seperti jauh panggang dari api. Sejak lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Riau justru berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2019 ini saja pertumbuhan ekonomi Riau hanya 2,74 persen. Jauh dibawah pertumbuhan ekonomi Sumatera yang mampu tumbuh sebesar 4,49 persen. Apalagi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,02 persen. Jangankan menjadi pusat perekonomian di Asia Tenggara menjadi lebih baik di Sumatera saja Riau tidak mampu. Sangat kontradiktif sekali ketika bercita-cita ingin menjadi semakin baik lalu yang terjadi malah semakin buruk. Ketika Visi Riau 2020 dicetuskan pertumbuhan ekonomi Riau justru jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih parah lagi, walaupun sudah dua puluh tahun berjalan tingkat kemandirian daerah di Riau belumlah baik. Meskipun mengalami perbaikan namun prosentasenya masih rendah. Pada tahun 2001 tingkat kemandirian daerah pemerintah Provinsi Riau hanya sebesar 25,58 persen. Sedangkan pada tahun 2018 naik menjadi 42,92 persen. Artinya, kucuran dana yang mencapai ratusan triliun belum mampu membuat Riau berdiri tegak atas kemampuan sendiri. Masih terdapat 490.720 jiwa penduduk miskin atau 7,08 persen dimana 314.790 jiwa diantaranya hidup di pedesaan. Tingkat pengangguran terbuka 5,97 persen yang merupakan nomor tiga tertinggi di Sumatera setelah Kepri dan Aceh. Lapangan pekerjaan utama penduduk adalah di sektor pertanian yakni 37,88 persen dan profesi utama yang dominan adalah sebagai buruh atau karyawan yang mencapai 43,41 persen. Parahnya lagi adalah kisaran tingkat inflasi yang masih cukup tinggi yakni mencapai 4,02 persen. Dengan Nilai Tambah Petani (NTP) yang rendah keadaan tersebut akan semakin memperdalam dan memperparah kemiskinan rakyat.

Lalu mengapa semua itu bisa terjadi ? *Pertama*, sejak otonomi dan desentralisasi fiskal diterapkan semakin tidak terjadi sinergi kebijakan pembangunan di Riau. Antara provinsi dan kabupaten kota tidak membangun suatu kesepahaman pembangunan bersama yang akan mengunkit kesejahteraan rakyat secara lebih kuat. Masing-masing



bergerak secara parsial sehingga multiplier effect nya rendah dan pembangunan daerah tidak berlangsung secara holistic. *Kedua*, Riau tidak kunjung terlepas dari ketergantungan terhadap alam dan segala isinya. Eksploitasinya dilakukan secara berlebihan dan tanpa pengawasan yang tegas. Maranya adalah kerusakan lingkungan, baik karena PETI dan HARHULA. Tidak ada kesadaran bersama untuk membangun inovasi dan kreativitas tanpa merusak alam. Justru dengan bernuansakan irama politik yang tercipta adalah memenuhi keinginan jangka pendek yang mengarahkan.

*Ketiga*, uang yang diperoleh dari kebijakan otonomi dan desentralisasi tidak digunakan dengan baik. Seakan-akan uang itu tidak memperoleh berkah. Dana sekitar Rp 670 triliun yang sudah dicurahkan ke Riau tidak menghasilkan *output* pembangunan yang bermanfaat tinggi. *Marginal cost* nya ternyata lebih tinggi dari *marginal revenue* nya. Oleh karena itu tidak mampu mengangkat kesejahteraan rakyat secara signifikan. Pemanfaatan dana tidak diarahkan pada ekonomi kesejahteraan. Arahnya lebih kepada pencitraan dan lebih bernuansa “penggelapan” oleh aparaturnya pelaksana. Sampai saat ini persoalan transportasi dan air bersih, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan tidak terselesaikan secara memadai dan tepat. Listrik pun masih mengandung masalah yang tak kunjung usai.

*Keempat*, orientasi pembangunan sumber daya manusia tidak dilakukan secara sistematis dan tepat sasaran. Ada beasiswa untuk generasi penerus namun arah pemberiannya tidak pada kebutuhan sumberdaya manusia seperti apa yang perlu dipacu agar Riau kian berkhidmat pada kemajuan manusia seutuhnya. Pendidikan tinggi kurang disentuh hanya atas dasar berlainan kewenangan. Riset-riset unggulan tidak diciptakan untuk membangun inovasi masyarakat dan kewirausahaannya.

*Kelima*, pintu gerbang ekonomi dunia yang menganga di Riau tidak dimanfaatkan untuk melakukan diversifikasi nilai tambah ekonomi. Ketergantungan ekonomi pada ekspor komoditas telah menyebabkan ekonomi Riau sangat rentan oleh dinamika ekonomi global. Sawit dan karet serta komoditas pertambangan tidak bisa diandalkan dalam jangka





- panjang untuk mengurai ketergantungan. Harus ada inovasi untuk
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

panjang untuk mengurai ketergantungan. Harus ada inovasi untuk  
menggarap sektor-sektor sekunder dan tersier secara lebih terencana  
dan serius. Bila tidak maka Riau tetap saja akan menjadi “bulan-bulanan”  
asing dan asing.

Gaura tahun 2020 telah dibuka dan Riau mau atau tidak harus  
melangkah ke dalamnya. Akhir hayat Visi Riau 2020 telah tiba. Mimpi  
itu ternyata terlalu indah. Begitu lama terlena dengan mimpi itu sehingga  
Riau bulannya menjadi *vocal point* Asia Tenggara, malah menjadi *bincit*  
Sumatera. Bagaimanapun, kita harus tetap membangun cita-cita.  
Tidak sepatasnya mengulang kesalahan. Itu hanya membuat kita jadi  
keledai. Merumuskan harapan adalah sebuah kepatutan dan menggapai  
harapan adalah sebuah keharusan. Semua itu membutuhkan kebersamaan  
bukan sekadar kepentingan kawan-kawan. Segeralah berbenah. *Ontab lab*  
*nyang....!*

\*\*\*\*



Repository University of Riau

<https://repository.unri.ac.id>

© Hak cipta milik Universitas Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.